

## ABSTRACT

Title : **Hizbut Tahrir's perspective of Wage**  
 Author : Ahmad Syakur  
 Promoters : Prof. Dr. HM. Ridlwani Nasir, MA  
 Prof. Dr. H. Burhan Djamiluddin, MA.  
 Key Words : Hizbut Tahrir, wage, *ijtihad* method

Employee and wage problem was one of the central issues in contemporary industrial economy, where majority of population dependent on the wages earned. To compromise workers and employers interest, government released a policy of wage. Nevertheless, these policies were often controversy and they have not been satisfactory. Hizbut Tahrir is intensely concerned with study of Islamic economics, particularly the nation's economy. Hizbut Tahrir thinking about wages much discussed in the primary books and the information media of this group. In the form of action, Hizbut Tahrir Indonesia actively participate and provide feedback and criticism to government in matters of minimum wage determination.

The focus of this study is the Hizbut Tahrir thinking about wages, the method of ijtiḥād which underlie these thoughts, as well as the position of the Hizbut Tahrir thinking about wages in the study of contemporary Islamic economics. Ethnography approach is used to explore in greater depth the Hizbut Tahrir thinking about wages in the treasures of Islamic economics studies. This approach is also used to explore the construction of Islamic legal thought Hizbut Tahrir which became foundation of thought in the field of wages and wage policy.

The findings of this study: 1). Wage standard based on Hizbut Tahrir perspective was measured with merely employment benefits. The equal wage by Hizbut Tahrir was equivalent with the benefits of labor which defined by experts in the field of wages. Wage was an agreement between employers and workers prerogative, the government should not interfere with a policy or establish a certain wage level. 2). Hizbut Tahrir thinking about wages was influenced with literalist *ijtihad* method and it used merely legal resources that are *qa'i*: al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat and *qiyas* restricted merely on '*illat* mentioned in texts. 3). The concept of wages in Hizbut Tahrir perspectives were different from the mainstream of contemporary Islamic economic thought. The concept of wages in Hizbut Tahrir perspectives were partially relevant in contemporary Islamic economics and partly irrelevant. The application of Hizbut Tahrir thinking about wages could result in the strengthening of capitalist hegemony. This is due to economic justice championed by Hizbut Tahrir limited only to the normative justice, not to the substantive justice.



## ABSTRAK

Judul : **Upah Perspektif Hizbut Tahrir**  
 Peneliti : Ahmad Syakur  
 Promotor : Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, MA  
 Prof. Dr. H. Burhan Djamiluddin, MA.  
 Kata Kunci : Hizbut Tahrir, upah, metode ijtihad

Pekerja dan pengupahan merupakan salah satu isu sentral dan ekonomi industrial kontemporer, di mana mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya dari upah yang diperoleh. Untuk mengkompromikan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengupahan. Namun seringkali kebijakan tersebut menuai kontroversi dan belum memuaskan dua belah pihak. Hizbut Tahrir sangat konsen dengan kajian ekonomi Islam, khususnya ekonomi negara. Konsep upah perspektif Hizbut Tahrir banyak dibahas dalam buku dan media gerakan ini. Dalam wujud aksi, Hizbut Tahrir Indonesia aktif memberi saran dan kritikan kepada pemerintah dalam penetapan upah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini adalah upah perspektif Hizbut Tahrir, metode ijthihad yang melatarbelakanginya, serta posisi upah Hizbut Tahrir dalam kajian politik ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan paradigma kualitatif dan pendekatan etnografi. Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep Hizbut Tahrir tentang upah, mendalami kontruksi pemikiran hukum Islam Hizbut Tahrir yang menjadi landasan konsep upah serta untuk menganalisis posisi pemikiran Hizbut Tahrir tentang upah dalam realitas ekonomi kontemporer.

Temuan penelitian ini: 1) Konsep upah Hizbut Tahrir ini hanya sebatas norma belum menjadi teori yang aplikatif. Upah menurut Hizbut Tahrir diukur berdasarkan manfaat kerja. Upah sepadan menurut Hizbut Tahrir adalah upah yang sepadan dengan manfaat kerja yang ditentukan oleh pakar, yang diberlakukan pada saat sengketa atau nilai upah tidak disebutkan dalam kontrak kerja. Penetapan upah adalah hak prerogatif pengusaha dan pekerja, pemerintah tidak boleh ikut campur dengan membuat kebijakan atau menentukan tingkat upah tertentu. 2). Upah perspektif Hizbut Tahrir dipengaruhi oleh metode ijtihad Hizbut Tahrir yang bersifat literalis dan hanya memakai sumber hukum yang bersifat *qa'i*, yaitu al-Qur'an, Sunnah, ijma' sahabat dan mempersempit qiyas hanya pada *'illat* yang disebut dalam nash. Metode ijtihad Hizbut Tahrir ini mirip dengan metode madzhab al- hiri, walaupun tidak identik. 3). Konsep upah Hizbut Tahrir berbeda dengan mainstream pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Konsep upah tersebut tidak semua relevan dalam politik ekonomi Islam kontemporer. Bahkan penerapan konsep upah Hizbut Tahrir secara utuh berakibat pada hegemoni kapitalis di negara berkembang. Hal ini karena keadilan ekonomi yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir hanya terbatas kepada keadilan normatif, tidak sampai kepada keadilan substantif.